

Pemuda, Politik dan Keterlibatan Sosial di Indonesia Kontemporer

Tentang penulis: Nurman Nowak memiliki gelar Master Kajian Asia Tenggara dan merupakan kandidat PhD di Universitas Göttingen, saat ini melakukan penelitian lapangan di komunitas miskin perkotaan di Jakarta. Sebelumnya dia bekerja untuk FES Indonesia di mana dia berpartisipasi dalam program pendidikan politik yang berfokus pada pemuda dan telah banyak menulis tentang perkembangan politik dan masyarakat sipil di Indonesia dan Malaysia kontemporer.

Pandangan dalam tulisan ini tidak mencerminkan pendapat dari Friedrich-Ebert-Stiftung.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) adalah Yayasan politik tertua di Jerman. Nama Yayasan ini diambil dari nama presiden Jerman pertama yang terpilih secara demokratis, Friedrich Ebert. Yayasan Friedrich Ebert memiliki jaringan internasional di lebih dari 100 negara dan memiliki misi untuk mendorong penerapan nilai-nilai demokrasi sosial, yaitu kebebasan, solidaritas, dan keadilan sosial.

FES mendirikan Kantor Perwakilan Indonesia pada tahun 1968 dan sejak 2012 telah bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial di bidang politik, ekonomi dan masyarakat, sebagai salah satu prinsip pokok **FES** di seluruh dunia. **FES** di seluruh dunia. **FES** Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung Reformasi Jaminan Sosial, Negara Kesejahteraan, dan Pembangunan Sosial Ekonomi di Indonesia serta mempromosikan Indonesia sebagai rujukan ke negara lain di kawasan dan di tingkat internasional untuk tema demokratisasi, sosial ekonomi dan pembangunan yang damai.

www.fes-indonesia.org

Imprint

©2021 Friedrich-Ebert-Stiftung
Kantor Perwakilan Indonesia
Jalan Kemang Selatan II No. 2 A |
Jakarta 12730
INDONESIA

Penanggung jawab:

Sergio Grassi | Resident Director

Phone : +62-21-7193711
Fax : +62-21-71791358
Email : info@fes.or.id
Website: www.fes-indonesia.org

Materi publikasi yang diterbitkan oleh **Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)** tidak dapat dipergunakan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan tertulis dari **FES**.

Pemuda, Politik dan Keterlibatan Sosial di Indonesia Kontemporer

Nurman Nowak



**FRIEDRICH
EBERT
STIFTUNG**

Pemuda, Politik dan Keterlibatan Sosial di Indonesia Kontemporer

Pandangan dalam tulisan ini tidak mencerminkan pendapat dari Friedrich-Ebert-Stiftung.

Imprint

©2021 Friedrich-Ebert-Stiftung
Kantor Perwakilan Indonesia
Jalan Kemang Selatan II No. 2 A |
Jakarta 12730
INDONESIA

Penanggung jawab:

Sergio Grassi | Resident Director

Phone : +62-21-7193711

Fax : +62-21-71791358

Email : info@fes.or.id

Website: www.fes-indonesia.org

Materi publikasi yang diterbitkan oleh **Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)** tidak dapat dipergunakan untuk tujuan komersial tanpa persetujuan tertulis dari **FES**.

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) adalah Yayasan politik tertua di Jerman.

Nama Yayasan ini diambil dari nama presiden Jerman pertama yang terpilih secara demokratis, Friedrich Ebert. Yayasan Friedrich Ebert memiliki jaringan internasional di lebih dari 100 negara dan memiliki misi untuk mendorong penerapan nilai-nilai demokrasi sosial, yaitu kebebasan, solidaritas, dan keadilan sosial.

FES mendirikan Kantor Perwakilan Indonesia pada tahun 1968 dan sejak 2012 telah bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan keadilan sosial di bidang politik, ekonomi dan masyarakat, sebagai salah satu prinsip pokok **FES** di seluruh dunia.

FES di seluruh dunia. **FES** Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung Reformasi Jaminan Sosial, Negara Kesejahteraan, dan Pembangunan Sosial Ekonomi di Indonesia serta mempromosikan Indonesia sebagai rujukan ke negara lain di kawasan dan di tingkat internasional untuk tema demokratisasi, sosial ekonomi dan pembangunan yang damai.

www.fes-indonesia.org

Daftar Isi

Pemuda, Politik dan Keterlibatan Sosial di Indonesia Kontemporer	1
Pendahuluan	2
Peran dan warisan aktivisme pemuda di Indonesia	3
Aktivisme pemuda dan munculnya arena perjuangan baru	5
Pemuda dan aktivisme mahasiswa di era Jokowi: Masyarakat yang terpolarisasi	8
Pemuda dan politik formal di era Jokowi.....	9
Melampaui politik formal – Bentuk baru cara berpartisipasi	11
Kebijakan pemuda, pemerintah dan krisis Covid-19	14
Menyongsong sebuah titik waktu baru.....	16
Daftar Bacaan	19
Daftar Singkatan	23

Pemuda, Politik dan Keterlibatan Sosial di Indonesia Kontemporer

Nurman Nowak, Universitas of Göttingen

14 Januari 2021

Ringkasan Eksekutif:

- (Pemuda Indonesia mencakup seperempat dari masyarakat Indonesia dan perkembangan pemuda sangat menentukan perkembangan sosial ekonomi masa depan negara saat bonus demografis tercapai. Mereka adalah pendorong digitalisasi kehidupan sehari-hari, karena lebih dari 80% mereka terhubung ke internet. Media sosial digunakan secara luas, terutama untuk berhubungan dengan rekan-rekan mereka, tetapi juga berfungsi sebagai sumber informasi penting tentang keadaan umum.)
- Pemuda memainkan peran yang menentukan di semua persimpangan sejarah perkembangan politik Indonesia, khususnya gerakan mahasiswa. Namun, transformasi sistem politik di awal tahun 2000-an telah membuat kemerosotannya menjadi marginalisasi dan menyebabkan polarisasi yang ditentukan oleh kelompok Islam konservatif kanan dan kelompok kiri progresif yang demokratis dan liberal yang mendefinisikan politik Indonesia selama sebagian besar dari masa dua dekade terakhir.
- Dominasi demografis kelompok pemuda membuat mereka berpotensi menjadi faktor yang menentukan dalam pemilu karena mereka mencakup sekitar 50% dari pemilih. Namun, generasi milenial dan GenZ dianggap enggan berpartisipasi dalam politik formal, meskipun (atau mungkin karena mereka) lebih tahu tentang politik daripada kelompok lain. Bentuk-bentuk aktivisme alternatif baru telah muncul, baik itu aktivisme

politik atau sosial, daring dan luring, yang menyangkal klaim sikap apatis mereka terhadap politik. Namun, keterlibatan mereka terbatas pada urusan lokal dan kelemahan struktural masyarakat sipil Indonesia yang menghambat perkembangan kerja sama yang dilembagakan dan internasional.

- Dampak pandemi COVID19 telah menimbulkan dampak yang menghancurkan terhadap generasi muda. Kaum pemuda telah diidentifikasi sebagai kelompok yang paling rentan terhadap pengangguran, dan karena akses internet tidak terdistribusi secara merata di sepanjang garis sosial dan geografis (kesenjangan perkotaan / pedesaan), langkah-langkah belajar dari rumah (penutupan sekolah dan universitas), semakin mengkonsolidasikan ketidaksetaraan sosial dan berdampak jangka panjang bagi perkembangan pemuda yang berada di posisi yang kurang mampu.
- Dalam dua tahun terakhir, gerakan mahasiswa tampaknya bangkit kembali dan menunjukkan tanda-tanda untuk mengatasi polarisasi yang telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir ketika pemerintah dikritik telah terperosok kembali ke dalam pola pemerintahan otoriter yang pada gilirannya mendorong timbulnya tujuan bersama yang baru dan panggilan moral untuk mempertahankan pencapaian demokrasi dan liberal dari gerakan reformasi. Namun, momentum populisme sayap kanan yang diwarnai Islam mengancam untuk mengkooptasi agitasi mahasiswa dan pemuda yang mulai dihidupkan kembali ini, ditam-

bah dengan dampak destruktif akibat kebijakan terkait Covid-19.

Pendahuluan

Masa depan adalah pemuda! adalah ungkapan yang sering didengar oleh para politisi dan aktivis, dan jika merujuk sekilas ke sejarah masa lalu, katakanlah 100 tahun yang lalu, memang menunjukkan bahwa jika pemuda mengatur energi pemberontakannya dan mengambil sikap dalam urusan bangsa atau bahkan dunia, perubahan yang tidak terpikirkan mungkin saja terjadi. Gejala sosial, kemajuan teknologi, transisi ekonomi dan politik serta realisasi utopia seringkali diluncurkan dan disambut baik oleh generasi muda. Namun, mereka mungkin juga dapat menjadi pihak pertama yang mengalami efek samping dan krisis destruktif yang menentukan masa depan komunitas, masyarakat, bangsa, atau bahkan dunia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2009 mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang berusia antara 16 hingga 30 tahun. Wacana kontemporer membagi mereka menjadi generasi milenial, yang lahir antara tahun 1981 dan 1997, dan GenZ, yang lahir antara tahun 1998 dan 2010. Menurut angka-angka resmi, terdapat 64,19 juta pemuda di Indonesia kontemporer seperti yang didefinisikan oleh negara, yaitu seperempat dari seluruh jumlah penduduk (BPS 2019). Nasib pembangunan masa depan Indonesia berada di pundak mereka, dengan perkembangan penduduk mendekati apa yang disebut *bonus demografis*, suatu kondisi demografis di mana jumlah penduduk yang pro-

duktif melebihi jumlah penduduk yang tidak produktif. Jika dikelola dengan baik, bonus demografi ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, namun dibutuhkan upaya besar negara dalam hal menyediakan pendidikan dan kesempatan kerja bagi mereka untuk menciptakan kondisi yang mendukung agar hal tersebut dapat terwujud (BPS 2019). Sementara itu, sektor komersial lah yang berusaha keras untuk merebut hati konsumen dari kelompok ini dengan maraknya konsumerisme, terutama di kalangan anak muda kelas menengah ke atas di perkotaan. Sebagai generasi pertama dalam sejarah yang lahir sepenuhnya di era digital, pemuda adalah motor penggerak di balik digitalisasi kehidupan sehari-hari. Menurut laporan pemuda terbaru yang dikeluarkan oleh lembaga survei Alvara, 88,4% generasi milenial dan 93,9% GenZ terhubung ke internet dengan GenZ menghabiskan lebih dari tujuh jam daring setiap hari, yang memberikan bukti klaim bahwa pemuda Indonesia benar-benar paham teknologi (Ali dan Purwandi 2020).

Selain itu, artikel ini juga membahas tentang peran pemuda Indonesia dalam politik dan masyarakat sipil. Bab-bab selanjutnya akan menjelaskan perkembangan politik Indonesia dari perspektif pemuda dan mahasiswa. Seperti yang akan kita lihat, kontribusi mereka sangat menentukan dalam mewujudkan keadaan politik saat ini dan karena massa demografis mereka, mereka berpotensi menjadi kekuatan politik yang kuat. Dengan menantang klaim bahwa kaum milenial dan GenZ apatis terhadap politik, bentuk dan cara baru

atas keterlibatan politik dan sosial akan dipaparkan dan akhirnya, efek pandemi Covid-19 sehubungan dengan perkembangan politik terbaru akan dikemukakan.

Peran dan warisan aktivisme pemuda di Indonesia

Penulis terkenal Indonesia Pramoedya Ananta Toer pernah menyatakan bahwa “sejarah dunia adalah sejarah orang muda” dan memang, pemuda dan mahasiswa telah memainkan peran yang menentukan di persimpangan sejarah penting dalam perkembangan politik negara sebagai latar belakang dari perubahan-perubahan sosial dan politik yang mereka alami.

Pemuda berada di garis depan gerakan nasionalis yang muncul pada awal abad ke-20 untuk melawan dan akhirnya menyingkirkan kolonialisme. Dalam sebuah pertemuan pada tahun 1926 di Batavia, sekarang kota Jakarta, para pemuda yang hadir pada pertemuan tersebut mengikrarkan kesetiaan kepada Bangsa Indonesia berdasarkan prinsip satu tanah persatuan, satu bangsa dan satu bahasa. Setiap tahun pada tanggal 28 Oktober, apa yang dinamakan sumpah pemuda diperingati dengan hari libur nasional. Tujuh belas tahun kemudian pada Agustus 1945, pemerintah Jepang, yang pasukannya menduduki kepulauan Indonesia saat itu, menyerah kepada sekutu. Dengan kekuatan penjajah dikalahkan dan mantan junjungan kolonial masih berada di luar wilayah, euforia nasionalis pun berkobar. Kelompok pemuda nasionalis radikal fana-

tik, Pemuda Indonesia, berada di garis depan untuk menuntut kemerdekaan segera. Tidak sabar menunggu lebih lama lagi, sekelompok pemuda menculik Sukarno, pemimpin utama perjuangan nasionalis, untuk memaksanya agar akhirnya memproklamasikan kemerdekaan keesokan paginya, pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada *perjuangan revolusi Indonesia* berikutnya, pemuda dari semua latar belakang menjadi tulang punggung tentara republik Indonesia dalam melawan pasukan Inggris dan Belanda. Jenderal Soedirman sendiri baru berusia 29 tahun ketika terpilih sebagai panglima tertinggi. Pemuda dipandang sebagai aktor utama dalam revolusi nasional Indonesia dan digembar-gemborkan sebagai pahlawan di masyarakat umum hingga saat ini.

Dua puluh tahun kemudian, pada 1965, Indonesia tiba pada titik lain dalam sejarahnya di mana protagonis muda akan memainkan peran kunci, mendorong munculnya gerakan pemuda terpenting di Indonesia - gerakan mahasiswa. Pada pertengahan 1960-an, iklim politik di Indonesia berada pada titik genting ketika hubungan Presiden Sukarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin dekat, yang mengkhawatirkan kelompok konservatif dalam tubuh militer dan kelompok masyarakat Islam. Ketegangan akhirnya meningkat pada tahun 1965 dan mendorong mahasiswa anti-komunis untuk mendirikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia - KAMI yang mengorganisir demonstrasi massa menuntut pelarangan PKI, pembersihan kelompok kiri dari kabinet, dan akhirnya pembubaran pemerintahan Sukarno.

Kemudian, yang terjadi di tahun-tahun beri-

kutnya adalah pembentukan negara otoriter dengan kelompok militer sebagai pilar utamanya dan Jenderal Suharto sebagai Presiden di pucuk pimpinan. Hak-hak sipil yang mendasar dilucuti dan setiap agitasi politik di luar institusi yang dikontrol ketat oleh pemerintah ditekan, meskipun dengan satu pengecualian: Setelah kampus dibersihkan dari unsur kiri, mahasiswa yang telah berperan dalam pembentukan rezim Orde Baru hampir secara eksklusif menjadi satu-satunya kelompok dalam masyarakat Indonesia yang dianugerahi hak istimewa untuk mengkritik pemerintah secara terbuka. Sebuah gagasan baru dikembangkan, gagasan yang akan membingkai aktivisme mahasiswa hingga hari ini: mahasiswa sebagai kekuatan moral. Dalam pemahaman ini, agitasi politik mahasiswa "dilatardibelakangi oleh prinsip moral dan etika yang tidak tercemar oleh dunia politik yang kotor dan korup" (Aspinal 2012). Mahasiswa dapat mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa pada saat krisis, dan karena itu para aktivis mahasiswa memosisikan diri mereka sebagai pengkritik rezim Suharto yang teguh namun setia, menuntut integritas, mengkritik rezim pembangunan destruktif yang tidak terkendali, namun dengan tujuan untuk melanggengkan rezim yang memperoleh kekuasaan antara lain dengan bantuan mereka.

Pada 1970-an, demonstrasi mahasiswa besar-besaran melanda jalan-jalan, yang mendorong diberlakukannya Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK), kebijakan yang menekan agitasi politik di kampus-kampus. Kebijakan ini memang membatasi aktivisme mahasiswa selama periode yang cukup lama,

tetapi juga mendorong mahasiswa yang lebih vokal dan radikal ke bawah tanah di mana mereka mengembangkan struktur klandestin. Sementara itu, konsolidasi ekonomi memperluas kelas menengah Indonesia dan para anak mudanya berbondong-bondong masuk ke kampus. Kalau pada tahun 1970 jumlah mahasiswa baru ada sekitar 255.000, pada tahun 1990 jumlah ini meningkat menjadi 1,6 juta dan kemudian meningkat lagi menjadi 3,6 juta mahasiswa pada akhir tahun 1990-an (Aspinall 2012), menjadikan mahasiswa sebagai massa sosial yang cukup besar. Dengan peningkatan ini, struktur aktivisme mahasiswa yang klandestin akhirnya meluas pada akhir 1990-an. Ketika krisis keuangan Asia tahun 1997 melanda negara itu, persimpangan sejarah lain yang menentukan semakin mendekat. Aktivis mahasiswa memobilisasi massa mahasiswa dan menyiapkan panggung untuk pemberontakan populer berikutnya - gerakan reformasi - yang menuntut dan akhirnya mewujudkan Indonesia yang demokratis.

Aktivisme pemuda dan munculnya arena perjuangan baru

Hak-hak sipil antara lain kebebasan pers, berbicara, berkumpul dan berorganisasi dipulihkan dan pemilihan anggota parlemen pertama yang bebas dan adil dengan 48 partai peserta berlangsung pada tahun 1999. Perubahan yang luar biasa berlangsung selama lima tahun berikutnya, dengan pemberlakuan desentralisasi kekuasaan dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten. Sementara pada tahun 1998 - 2001 terjadi tiga kali per-

gantian presiden yang datang dan pergi, yaitu Habibie (1998-1999), Abdurrahman Wahid (1999-2001) dan Megawati Sukarnoputri (2001-2004), sementara fase berikutnya relatif tenang di bawah kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (2004- 2014), presiden terpilih pertama dalam sejarah Indonesia.

Pada 1999-2004, yang merupakan periode reorganisasi struktur kekuasaan, gerakan mahasiswa menunjukkan tanda-tanda pembubaran seiring dengan kesadaran bahwa gagasan gerakan mahasiswa yang bersatu yang semata-mata dimotivasi oleh prinsip-prinsip moral adalah mitos belaka. Sebagaimana dikemukakan oleh Yatun Sastramidjaja, keberhasilan gerakan mahasiswa menggalang dukungan dari masyarakat luas dalam menggulingkan rezim Suharto merupakan hasil dari keberagaman ideologinya sehingga memungkinkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Sastramidjaja 2019a). Begitu alasan untuk bersatu lenyap, perbedaan ideologis dan loyalitas pribadi kepada elit politik muncul ke permukaan, yang mengadu domba antara kelompok mahasiswa yang satu dengan yang lain, mengakibatkan proses perpecahan yang berlangsung sejak saat itu. Pembagian utama secara kasar dapat didefinisikan sebagai dua aliran politik-budaya, aliran Islam dan aliran mahasiswa kiri.

Banyak peneliti tentang transisi Indonesia menuju demokrasi setuju bahwa pada akhirnya jatuhnya Orde Baru sebagian besar adalah karya aktivis mahasiswa kiri, karena mereka-lah yang pertama kali menuntut penghapusan posisi supremasi militer dan pengunduran diri Presiden Suharto, dengan demikian berawal

sedikit banyak dari gagasan kekuatan moral juga. Pandangan ideologis mereka didasarkan pada gagasan (neo-) marxis dari Kiri Baru, aliran filsafat Frankfurt, dan aliran pemikiran kiri lainnya. Seperti yang terjadi di belahan lain dunia, mahasiswa kiri pada dasarnya dari dulu sampai sekarang selalu terpecah secara ideologis, tetapi mereka berbagi visi umum dalam melihat negara mereka, yaitu sebagai suatu masyarakat terbuka dengan distribusi kekayaan yang adil, sistem budaya dan politik yang inklusif untuk semua warga negara terlepas dari latar belakang agama, kelompok etnis, kelas, dll., serta struktur yang demokratis di semua bidang pemerintahan dan ekonomi. Banyak organisasi mahasiswa sayap kiri yang ada pada tahun-tahun transisi yang panjang (awal 1989 - 2004) kemudian mengalami kemunduran kemerosotan yang diakibatkan oleh perpecahan dan pindahnya jaringan aktivis penting ke dalam politik formal (ibid).

Namun itu sama sekali bukan berarti bahwa struktur pemuda yang progresif dalam lanskap politik Indonesia telah berakhir. Demokratisasi sistem di Indonesia telah menyebabkan peningkatan besar-besaran dan perluasan masyarakat sipil independen di mana para aktornya beroperasi di semua bidang dari tingkat kabupaten hingga nasional. Sementara beberapa mantan aktivis menjadi politisi, banyak lainnya yang bergabung dengan atau mendirikan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) baru di bidang hak asasi manusia, bantuan hukum, perjuangan hak atas tanah masyarakat adat, petani, kaum miskin kota, buruh, gerakan lingkungan, pemberdayaan perempuan dan pemuda, dll. Struktur-struktur ini jelas dan menarik bagi

mahasiswa dan pemuda dengan pola pikir idealis dan yang cenderung progresif di Indonesia kontemporer (ibid).

Organisasi-organisasi ini sering kali terhubung secara longgar antara satu sama lain dalam bentuk jaringan aktivis di tingkat personal, yaitu banyak yang saling mengenal satu sama lain dari kampus atau konferensi, namun kerja sama yang dilembagakan terhambat oleh kelemahan struktural seperti persaingan untuk pendanaan dan afiliasi dengan jaringan patronase yang berlawanan. Sementara banyak OMS merupakan bagian dari jaringan internasional dengan agenda yang mengacu pada program-program PBB-TPB (*UN-SDGs*), kebanyakan dari mereka berfokus pada isu-isu yang lebih lokal (Aspinall 2012).

Sisi lain dari spektrum ini didominasi oleh politik Islam yang sejak saat itu menjadi pilar penting dalam lanskap politik dan sosial budaya Indonesia, serta memperoleh daya tarik baru dengan apa yang disebut kebangkitan Islam, yaitu peningkatan kesalehan beragama di kalangan pemuda dan masyarakat yang lebih luas. Kemunculannya dipicu oleh agitasi para mahasiswa yang kembali pulang dari Timur Tengah, yang terinspirasi oleh kelompok dakwah Islam yang mereka temui di sana. Mereka berkhotbah di komunitas-komunitas di seluruh nusantara dan mendapatkan pendengar yang reseptif karena agama memberikan orientasi dalam menghadapi perubahan sosial mendasar yang dipicu oleh pembangunan pesat dan urbanisasi yang merajalela. Organisasi Islam termasuk yang paling aktif dan berpengaruh secara sosial. Saat ini mereka dapat

dibagi menjadi dua kubu, yaitu kubu arus utama dan kubu konservatif, dan keduanya diwakili oleh banyak organisasi mahasiswa dan pemuda, di luar dan di dalam kampus.

Kubu Islam arus utama antara lain diwakili oleh HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia) yang berakar pada masa pra-Orde Baru dan memiliki pengikut sekitar 500.000 mahasiswa. Organisasi ini mempertahankan hubungan dengan semua partai Islam di era pasca-reformasi saat ini, tetapi bersikeras untuk independen. Banyak alumninya yang sudah menempati posisi-posisi penting di layanan sipil, parlemen dan masyarakat sipil (Wawancara dengan Fajar Iman). Bersama dengan organisasi Islam lainnya, HMI tetap menjadi protagonis utama kegiatan dakwah Islam di kampus.

Kebangkitan Islam juga memunculkan kelompok-kelompok Islam konservatif dengan *dakwah tarbiyah* sebagai protagonis terpenting, yang menumbuhkan bentuk studi dan tafsir kitab suci Islam secara literal, dan merupakan landasan teologis fundamentalisme agama. Penganut Ikhwanul Muslimin yang berbasis di Mesir tetapi berorientasi pada transisi juga telah menyusup ke kampus-kampus Indonesia pada tahun-tahun 1980-an dan 1990-an melalui saluran tarbiyah, dengan memopulerkan ajaran para pemikir Islam seperti Sayyid Qubt. Pada tahun 1998, aktivis dari jaringan ini bersama dengan kelompok mahasiswa berorientasi konservatif lainnya mendirikan KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). KAMMI menjalin hubungan kuat dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera), sebuah partai Islam konservatif dan cabang dari Ikhwanul Muslimin (Laskowska 2019).

Berbeda dengan gerakan mahasiswa kiri, gerakan Islam telah mengembangkan pijakan ideologis yang kuat di Indonesia dengan perwakilan di parlemen melalui PKS serta strategi agitasi politik jangka panjang berkat sosialisasi ideologis selama puluhan tahun yang dilakukan para penganut senior dan juniornya. Organisasi Islam konservatif adalah organisasi paling populer dan sukses di kalangan mahasiswa Muslim yang diwakili oleh berbagai organisasi di dalam dan di luar kampus (Sastramidjaja 2019a). Banyak yang mempertahankan pandangan internasional dalam seruan mereka tentang solidaritas Islam, misalnya dengan mendukung intifada Palestina atau Uighur di China, serta mengadakan pertemuan dengan kelompok Islam di negara lain.

Kekuatan gerakan Islam konservatif yang dipimpin oleh para aktivis muda dengan sangat baik ditampilkan lewat keberhasilan mereka dalam penaklukan hegemoni atas Islam Indonesia pada pertengahan tahun 2000-an. Pada akhir abad ke-20, Islam di Indonesia memiliki reputasi yang sangat toleran sebagai akibat dari pengaruh para intelektual Islam yang berpikiran liberal yang memimpin dua ormas Islam terkemuka Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Namun, dua kelompok itu akhirnya tersingkir oleh generasi baru aktivis muda Islam, yang disosialisasikan dan dibesarkan dalam jejaring tarbiyah, dan berhasil menempatkan ulama konservatif di posisi-posisi strategis. Kemudian, fatwa, yaitu opini hukum yang tidak mengikat, bahwa pluralisme, sekularisme dan liberalisme tidak sesuai dengan ajaran Islam segera diberlakukan, yang merupakan serangan berat terhadap

perkembangan progresif sejak reformasi dihantarkan (van Bruinessen 2012).

Sebagai dampak dari “perubahan konservatif” (ibid) dalam Islam Indonesia ini kemudian terjadi peningkatan intoleransi, penganiayaan, dan berbagai tindakan kekerasan terhadap kelompok agama dan kelompok seksual minoritas. Kemudian muncul wacana-wacana yang menyarankan bahwa menempatkan perempuan dan non-Muslim di posisi-posisi penting yang menggunakan kekuasaan atas mayoritas penduduk Muslim merupakan pelanggaran terhadap ajaran Islam. Gerakan Islam konservatif ini mencerminkan adanya suatu gerakan balasan yang bertujuan untuk menyirnakkan pencapaian-pencapaian progresif sejak jatuhnya Suharto. Gerakan ini dapat memperjuangkan dan memaksakan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia antara lain juga karena pendekatan *laissez-faire* dan inklusif selama pemerintahan SBY (2004-2014), yang lebih melakukan kooptasi daripada menantang kekuatan konservatif. Seperti antipode progresifnya, sebagian besar anggota dari gerakan balasan yang tidak liberal ini berasal dari kelompok mahasiswa dan kelompok pemuda lain dalam masyarakat Indonesia yang lebih luas.

Pemuda dan aktivisme mahasiswa di era Jokowi: Masyarakat yang terpolarisasi

Polarisasi ini merupakan pendorong agitasi politik yang signifikan di era Indonesia kontemporer. Ketika gerakan balasan ini mer-

encanakan serangan lain terhadap institusi progresif, pihak lain akan memobilisasi pengikutnya untuk mempertahankan prestasi yang telah mereka perjuangkan dan sebaliknya.

Pada 2014, polarisasi ini mencapai klimaks pertama dalam konteks pemilihan presiden. Kelompok Islamis bergabung dengan Prabowo Subianto, mantan menantu Suharto, mantan jenderal angkatan bersenjata Indonesia yang dianggap bertanggung jawab atas kekerasan terhadap *gerakan reformasi* dan kini menjadi calon presiden. Pesaingnya adalah Joko Widodo (atau Jokowi), yang menampilkan citra sebagai pendatang baru yang progresif, tidak ternoda oleh korupsi yang tetap marak di kalangan elit politik, yang secara radikal bertolakbelakang dengan Prabowo, seorang jenderal dari masa Orde Baru. Pada 2012, Jokowi memenangkan Pilkada Jakarta, yang menjadikannya gubernur ibu kota Indonesia sebelum partai PDI-P merangkulnya dan menjadikannya calon presiden pada 2014.

Pemilihan presiden 2014 dianggap menentukan masa depan perkembangan politik Indonesia, yang memobilisasi banyak mantan aktivis reformasi mahasiswa. Mereka bersatu di belakang Jokowi dan membentuk jaringan yang disebut Seknas Jokowi. Jejaring ini berhasil memobilisasi ribuan relawan muda dari segudang gerakan sosial progresif yang kemudian mendongkrak citra Jokowi sebagai kandidat berjiwa muda, bebas korupsi, yang ternyata sangat menentukan dalam membujuk pemilih generasi milenial agar memilih Jokowi. (Sastramidjaja 2019b)

Era Jokowi yang berlangsung hingga saat

ini ternyata menjadi masa yang penuh gejolak dan memantapkan polarisasi yang memuncak pada akhir tahun 2016 ketika unjuk rasa terbesar dalam puluhan tahun merebak di Jakarta. Mantan wakil gubernur Basuki Tjahja Purnama (atau Ahok), seorang Tionghoa Indonesia dan beragama Kristen, telah mengambil alih jabatan gubernur setelah Jokowi menjadi presiden. Pada bulan September, sebuah video dengan teks hasil rekayasa menjadi viral, yang menunjukkan bahwa Ahok diduga menghina Islam dalam pidatonya. Pada tanggal 2 Desember 2016, protes besar-besaran dengan 500.000 peserta dengan mengusung gagasan membela Islam, yang dipimpin oleh ulama kontroversial Rizieq Shihab, dilancarkan untuk menuntut agar Ahok diadili (Grassi dan Nowak 2017). Sebagian besar pengunjuk rasa adalah generasi milenial, siswa senior sekolah menengah Islam, mahasiswa, dan pemuda mandiri, yang turun ke jalan mengikuti seruan untuk “membela agama mereka”. Gerakan anti-Ahok bercorak Islam ini memiliki efek samping yang pahit karena peristiwa tersebut menjadi tantangan bagi budaya nasional Indonesia yang pluralis dan inklusif. Hal ini kemudian memicu demonstrasi tandingan dengan ribuan peserta, terutama dari kelas menengah dan atas perkotaan untuk mendukung Ahok, dan untuk membela narasi pembangunan bangsa Indonesia yang pluralis dan inklusif. Tapi aktivisme mereka sia-sia. Dalam pemilihan gubernur pada Februari 2017, Anies Baswedan, yang sejak itu dirangkul oleh PKS dan Partai Gerindra di bawah pimpinan Prabowo, menang dengan memanfaatkan sentimen agama, sementara Ahok segera setelah itu dijatuhi hukuman penjara dua tahun.

Pemuda dan politik formal di era Jokowi

Perkembangan demografis Indonesia telah menganugerahkan pemuda Indonesia dengan posisi strategis lainnya – ketegasan *suara pemuda* yang mewakili hampir 50% pemilih dalam pemilihan presiden.

Pemilu 2014 umumnya dianggap sebagai pemilu Indonesia pertama dengan kampanye pemilu daring yang khusus membidik kelompok pemuda di media sosial dan kanal YouTube. Pada 2019, kedua kubu yang bersaing menghabiskan jutaan dolar untuk membiayai kampanye daring di berbagai platform media sosial dan berusaha keras untuk menciptakan citra muda pada kandidat pemilu masing-masing (Sastramidjaja 2019b).

Ketika Presiden Jokowi memasuki StadionGBK Senayan untuk membuka Asian Games 2018, dia mengendarai sepeda motor besar yang dimodifikasi, mengenakan jaket Denim dan sepatu kets putih - pakaian kampanye pemilihannya. Tak lama kemudian, dia menyampaikan capaian pembangunan infrastruktur pemerintahannya dengan gaya yang sama, dengan berkeliling Papua naik sepeda motor bersama beberapa anggota kabinetnya. Instagram, Twitter, dan Facebook segera dibanjiri dengan gambar dan video ini, mengesankan para milenial dan GenZ seperti yang disarankan oleh komentar tersebut. Sebaliknya, tim Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres, yaitu seorang politisi berusia 40-an yang meraup kekayaan sebagai pengusaha di AS dan segera membangun citranya dengan meniru wirausahawan terkemuka

seperti Elon Musk - model panutan baru bagi milenial dan GenZ. Para *influencer* dengan jutaan pengikut dipekerjakan untuk berbicara mendukungnya, berkontribusi pada kampanye *#gantipresiden*. Selain itu, kedua kubu mendesak pendukung mereka untuk menjadi pasukan *cyber* yang akan berkomentar, berbagi postingan, dan membuat meme. Namun, selain simbolisme ini, hanya sedikit yang sejalan dengan masalah aktual yang dihadapi oleh pemuda, yaitu pendidikan, biaya hidup yang terjangkau serta peningkatan "fasilitas pemuda" di tempat-tempat umum (Irwanto 2020).

Sementara pemilihan presiden 2014 dianggap menentukan arah perkembangan politik Indonesia di masa depan dan *suara pemuda* diidentifikasi sebagai kunci kemenangan Jokowi, namun perlu dicatat bahwa mereka yang benar-benar memberikan suara jumlahnya kurang dari 50%. Selain itu, walaupun partisipasi pemilu pada 2019 mencapai level tertinggi baru, yaitu 80%, suara pemuda lagi-lagi tetap relatif rendah.

Hal ini membuktikan klaim banyak studi tentang pemuda bahwa kaum milenial dan GenZ bersikap apatis terhadap politik formal, dan pada saat yang sama mereka memiliki informasi yang lebih baik daripada kelompok generasi lainnya tentang urusan politik saat ini (Chen dan Syailendra 2014, Tumenggung dan Nugroho 2005). Berita politik biasanya muncul di *feed* Facebook, Twitter, atau Instagram di suatu tempat antara video kucing dan selfie. Namun, sikap apatis tidak selalu mencerminkan ketidaktertarikan. Pada 2019, sebuah video pengecekan fakta oleh vlogger Vincent

Ricardo tentang klaim yang dibuat dalam debat pemilu membuatnya mendapatkan jutaan penayangan (Insani 2019). Oleh karena itu, banyak pengamat menyarankan untuk menafsirkan sikap apatis ini sebagai reaksi terhadap arah transisi demokrasi yang sangat disadari oleh kaum muda.

Meskipun secara nominal rekam jejak demokratisasi tampak mengesankan, sejumlah studi menyimpulkan bahwa lembaga-lembaga demokrasi baru telah ditelung oleh elit ekonomi dan politik lama. Sebagai contoh, ada banyak partai politik baru yang muncul mewakili kendaraan politik mantan kroni-kroni yang dekat dengan keluarga Suharto yang mengukuhkan diri sebagai tokoh berpengaruh yang kuat (Robison dan Hadiz 2004). Politik dianggap sebagai urusan elit, di mana kepentingan umum dikebelakangkan. Masalah terkait lainnya adalah maraknya skandal korupsi. Baru-baru ini seorang anggota kabinet ditangkap karena keterlibatannya dalam kasus korupsi terkait barang bantuan COVID-19 (Fachri-nasyah 2020). Korupsi, kolusi dan nepotisme terus yang merajalela di sistem baru seperti di masa lalu, dan dengan latar belakang ini sikap apatis generasi muda terhadap politik formal dapat dipahami.

Menanggapi hal ini, beberapa wartawan dan mantan aktivis kemudian mendirikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada tahun 2013, sebuah partai milenial yang memproklamkan diri mereka sebagai partai yang "tidak lagi tersandera oleh kepentingan politik lama, rekam jejak buruk, warisan sejarah dan citra buruk partai-partai lama". Untuk memperoleh dan

menduduki jabatan di partai tersebut, usia anggota partai tidak boleh lebih dari 45 tahun, dan 50 persen pengurus partai harus diisi oleh perempuan. Agenda mereka dikemas dalam retorika anti-intoleransi, anti-korupsi dan pro-pluralis yang progresif, namun keanggotaan individu yang diketahui telah terlibat dalam kasus korupsi dan politik transaksional serta dukungan tanpa syarat terhadap undang-undang kontroversial telah sangat mencoreng citra ini (Sastramidjaja 2019b).

Organisasi-organisasi kemahasiswaan di kampus-kampus yang terkait dengan sayap pemuda partai politik telah mencoba menampilkan diri mereka dengan cara-cara non-partisan yang tidak berpolitik, seperti yang ditunjukkan oleh studi tentang organisasi kemahasiswaan di Universitas Indonesia. TIDAR, yang terkait dengan Gerindra (partai Prabowo) misalnya, mempromosikan “filosofi lima cinta” berdasarkan “cinta diri, cinta timbal balik, cinta belajar, cinta sopan santun dan cinta Indonesia”, sementara GMNI yang terkait dengan PDI-P (partai Jokowi) memiliki daya tarik “non-partisan, non-konformis” bagi pelajar yang berpikiran sekuler, suka pada indie-rock, dan peduli dengan keadaan asli republik di tingkat akar rumput” (Chen dan Syailandra 2014).

Apatisme terhadap politik juga terlihat di bidang ekstra-parlementer, yang mungkin paling baik diilustrasikan dengan marginalisasi gerakan mahasiswa. Selain itu, meskipun partisipasi pemuda cukup kuat dalam gerakan sosial lainnya, apakah gerakan itu konservatif, progresif atau sebaliknya, hal tersebut tidak

mewakili pemuda Indonesia pada umumnya. Ditambah lagi, gerakan-gerakan ini bukanlah gerakan pemuda dalam arti literal, yaitu menuntut hak dan menyuarakan keluhan bagi dan kepada generasi muda seperti *Fridays for Future* di Barat, tetapi mewakili kepentingan partikularistik atau bagian di mana pemuda melakukan agitasi bersama aktivis dari generasi lain.

Sejauh menyangkut marginalisasi gerakan mahasiswa, ada juga faktor struktural yang harus dipertimbangkan yang menghantui seluruh lanskap sosial. Tren baru privatisasi dalam kebijakan pendidikan tinggi telah mengeksklusi pemuda yang berasal dari latar belakang kurang mampu dari universitas karena tidak mampu membayar biaya kuliah, yang pada gilirannya menghambat agitasi politik. Mahasiswa juga mengeluhkan jadwal perkuliahan yang lebih ketat serta beban kerja yang lebih berat, fitur-fitur yang menyertai kebijakan tersebut hanya menyisakan sedikit waktu dan ruang untuk keterlibatan sosial. Demikian pula, otoritas kampus menjadi semakin tidak toleran terhadap aktivisme mahasiswa di kampus (Sastramidjaja 2019a).

Melampaui politik formal – Bentuk baru cara berpartisipasi

Meskipun demikian, sikap apatis pemuda terhadap politik bukan berarti bahwa ada penolakan umum terhadap keterlibatan sosial. Setiap kali terjadi bencana melanda negeri mereka, mahasiswa dan pemuda segera mengorganisasi sumbangan dan dana untuk

mendukung upaya bantuan. Ada juga permintaan yang kuat untuk kegiatan sukarela, misalnya sebagai guru di sekolah-sekolah yang dikelola LSM bagi anak-anak yang kurang mampu, yang seringkali berbasis di wilayah-wilayah yang disebut sebagai kampung perkotaan, tempat tinggal kaum miskin kota atau di tempat-tempat yang jauh di kabupaten dan kota yang telantar, yang tidak terjangkau infrastruktur sosial pemerintah. Upaya bantuan untuk melawan dampak sosial krisis Covid-19 adalah salah satu contoh lainnya. Selama beberapa bulan para pemuda dan mahasiswa terlihat membagikan makanan, cairan pembersih tangan dan masker. Mereka membantu dalam mengatur dan menyiapkan bak cuci tangan sementara dan melancarkan kampanye penggalangan dana secara daring untuk membiayai upaya mereka. Namun, bentuk keterlibatan sosial ini kegiatan sering disebut sebagai 'aktivisme amal' dan dianggap melampaui ranah politik (Sastramidhaja 2019b).

Klaim bahwa pemuda apolitis menjadi semakin rapuh begitu orang melihat di balik perbedaan antara formal dan informal. Faktanya, kurang dari 7% pemuda yang benar-benar menjadi anggota resmi dari organisasi apa pun (Dewi, 2020). Dr. Muhammad Faisal, pendiri *Youth Lab Indonesia* dan tim penelitiannya yang berdedikasi telah banyak mempelajari pemuda Indonesia melalui pendekatan etnografi.

Narasinya tentang keterlibatan pemuda kontemporer menekankan hubungan antara aktivisme politik dengan budaya pemuda alternatif yang independen. Dimulai di Bandung pada awal 2000-an, sebuah gerakan yang

mencampurkan aktivisme dengan musik rock indie, budaya pop, dan gaya busana tertentu mulai digemari oleh kaum muda di kota-kota lain di Indonesia. Contoh dari aktivisme pemuda semacam ini adalah kelompok band *punk rock*, yaitu *Superman is Dead* dari Bali dan komunitas penggemarnya yang luas. Pada tahun 2015, kelompok band ini menyatakan solidaritasnya terhadap masyarakat pesisir yang akan kehilangan mata pencaharian akibat proyek reklamasi di pantai Bali untuk membangun hotel dan resor mewah jenis baru. Mereka terlibat dalam upaya menggalang gerakan sosial dengan mengusung gagasan *tolak reklamasi!* dan kelompok band ini menyanyikan lagu-lagu perlawanan serta memobilisasi ribuan pemuda dari Bali dan sekitarnya. Budaya pop indie yang terjalin erat dengan aktivisme (sporadis) seperti itu ada di mana-mana di kota-kota di Indonesia dan terjadi secara informal, seringkali di sekitar musisi dan kelompok band di bawah tanah. Jejaring dan ikatan pertemanan yang berkembang dalam konteks ini kemudian memenuhi jalan-jalan jika ada masalah politik yang menarik perhatian mereka atau dalam aktivitas yang lebih langsung, misalnya mendukung pembuatan proyek berkebutuhan perkotaan di lingkungan sekitar, atau pendirian kedai kopi yang menjual kopi lokal (Wawancara, November 2020).

Aktivisme daring adalah bentuk lain di mana generasi milenial dan GenZ dominan. Meski sering disebut sebagai 'klikktivisme' tanpa dampak nyata dalam kehidupan yang sebenarnya, bentuk ini sering dianggap sebagai pseudo aktivisme, namun label ini menyesatkan, karena upaya oleh banyak pemuda, mi-

salnya dalam membangun prakarsa pencarian fakta yang menyanggah dan mengungkap berita-berita palsu merupakan kontribusi yang bermakna dan penting bagi literasi daring.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa sebagian besar agitasi politik dan sosial yang dilakukan oleh generasi muda terlewat begitu saja, tidak diperhatikan karena terjadi secara informal dan sering dikaitkan dengan ranah lain.

Seperti yang terjadi di tempat lain di dunia, aktivisme politik pemuda didominasi oleh anggota kelas menengah. Selain itu, meskipun jumlah mahasiswa telah mencapai jutaan, mereka hanya mencakup sekitar 10 persen dari populasi pemuda (BPS 2019). Ini menunjukkan adanya masalah dengan gagasan umum tentang ‘pemuda’ karena istilah itu mengesampingkan keragaman kompleks yang ditimbulkan oleh kelompok (semu) ini. Pemuda dibagi berdasarkan tempat (perkotaan dan pedesaan), jenis kelamin, kelas sosial, etnis dan agama, yang bukan hanya berpengaruh pada orientasi ideologis dan identitas, tetapi, pada kenyataannya, juga berpengaruh pada kemampuan mereka untuk berpartisipasi.

Dalam dunia perkotaan Jakarta, ketimpangan sosial memanifestasikan dirinya dalam segregasi sosial. Sementara kaum muda dari kelas menengah menghabiskan sebagian besar waktunya di banyak pusat perbelanjaan, generasi muda dari kaum miskin kota berkeliraran di kampung-kampung perkotaan dan jalanan kota untuk mencari pekerjaan di sektor informal. Anggota kelompok pemuda ini jumlahnya tidak diketahui pasti tetapi men-

capai jutaan, contohnya di Jabodetabek, dan mereka menjadi target perekrutan organisasi preman seperti Forum Betawi Rempug (FBR) atau ormas seperti Front Pembela Islam (FPI). Absennya kekuasaan negara membuat kelompok-kelompok ini menguasai bagian-bagian dunia informal, seperti pasar jalanan informal dan terminal bus di mana mereka memungut uang perlindungan dari pedagang kaki lima dan mengontrol tempat parkir. FPI terkenal karena serangannya terhadap tempat-tempat “tidak bermoral” seperti kedai alkohol dan bar. Kedua organisasi tersebut telah “dipekerjakan” di masa lalu sebagai centeng jalanan oleh investor atau politisi dalam konteks konflik atas penguasaan dan penggunaan lahan perkotaan, dan selama pemilu mereka sering berfungsi sebagai bank pemungutan suara di mana penawar tertinggi dapat membeli ribuan surat suara dan dapat menyediakan pengunjuk rasa untuk demonstrasi jalanan. Sebagai contoh, FPI memainkan peran penting dalam pengorganisasian demonstrasi anti-Ahok pada tahun 2016. Namun, organisasi ini juga dikenal karena keterlibatan mereka dalam kegiatan amal dan upaya bantuan masyarakat, dan mungkin melindungi kampung-kampung perkotaan yang terkena bencana dari penjarahan, atau sering diminta menjadi tenaga kerja dalam upaya untuk membangun kembali kampung-kampung kota yang hancur akibat penggusuran. Bagi banyak pemuda miskin, organisasi-organisasi ini menawarkan pekerjaan dan pengalihan yang disambut baik dari beban hidup sehari-hari yang mereka hadapi, sementara keterlibatan mereka dalam upaya bantuan juga membuat mereka memperoleh peng-

hargaan dan rasa hormat (Ian Wilson 2019). Namun, yang lebih penting lagi, Habib Rizieq, pendiri dan pemimpin FPI telah bangkit menjadi aktor politik, menyelaraskan dirinya dengan kubu anti-Jokowi, dan sebagai akibatnya sebagian besar preman dan organisasi masyarakat dan jejaring yang berbasis di perkotaan terkait dengan FPI sekarang mewakili kekuatan oposisi. Walau demikian, mereka lebih dari sekadar obyek dalam permainan politik pelindung mereka. Dalam percakapan pribadi, anggota-anggota organisasi tersebut mengemukakan alasan yang lengkap dan sah atas keterlibatan mereka, dengan menyatakan bahwa gerakan tersebut telah memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan keluhan mereka terhadap pemerintah. Anggota-anggota pemuda kemudian menjadi aktor dalam arena politik dan ranah sipil itu sendiri, tidak dalam semua kasus ini terjadi secara tidak disadari dan terkadang menentukan dalam perebutan kekuasaan yang berlaku¹.

Kebijakan pemuda, pemerintah dan krisis Covid-19

Sejauh ini telah menjadi jelas bahwa dalam proses konsolidasi politik elit, isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama, telah tergeser ke belakang dan agenda neoliberal yang berpihak pada kepentingan bisnis besar tetap menjadi norma yang berlaku. Hal ini juga telah terbukti dalam pelaksanaan program-program pembangunan pemuda pemerintah, walaupun kebijakan dan undang-un-

dang resmi negara menekankan pentingnya pemuda untuk pembangunan bangsa Indonesia di masa depan.

Kebijakan-kebijakan dalam dua dekade terakhir ini menekankan kewirausahaan pemuda dan mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai bidang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pemuda dalam menghadapi stagnasi industrialisasi yang memungkinkan pendekatan yang berbeda. Di tingkat daerah, instansi pemerintah kota terkait dengan koordinasi UMKM (Dinas UMKM) menawarkan berbagai program pendidikan dan skema pendanaan untuk merealisasikan kebijakan ini. Kebijakan ini juga cukup sejalan dengan aspirasi kaum muda karena banyak penelitian mengungkapkan bahwa menjadi wirausaha adalah pekerjaan yang paling diminati oleh para milenial dan anggota GenZ (Faisal 2019).

Masalah mendesak di kalangan pemuda, bagaimanapun, adalah pendidikan, kesehatan (reproduksi), pekerjaan, ketahanan pangan dan penyebaran ideologi ekstremis. Rangkuman hasil penelitian SMERU Research Institute (Dewi 2020) mengenai kondisi anak muda saat ini (2018/2019) mengungkapkan antara lain kualitas pendidikan di Indonesia yang berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan jika dibandingkan dengan peringkat internasional, yaitu berada di peringkat ke-72 dari 78 negara peserta menurut studi PISA pada 2018. Dalam hal tingkat pengangguran, statistik menunjukkan bahwa tiga dari empat warga yang menganggur adalah pemuda, meskipun sebagian besar dari mereka berpendidikan se-

1 Riset Lapangan, Jan. 2020 – Des. 2020

kolah menengah atas. *Stunting*, suatu kondisi kesehatan yang menghambat perkembangan awal anak karena gizi dan pola makan yang buruk masih terus merajalela, yang bukan hanya menjadi masalah ketahanan pangan tetapi juga berkontribusi pada gangguan pendidikan, masalah yang sangat umum terjadi pada ibu remaja.

Menurut studi yang dikoordinasi oleh UNESCO, sejak 2013 (Ramadhan 2013) tidak ada implementasi kebijakan yang terkoordinasi, karena ada delapan program berbeda yang dikoordinasikan oleh kementerian yang berbeda dengan maksud yang berbeda dan bahkan mengikuti definisi yang berbeda tentang pemuda. Kondisi ini, menurut Fajar Iman Hasanie, peneliti pemuda dari Merial Institute, belum banyak membaik sejak saat itu (Wawancara, November 2020) meski sudah ada keputusan presiden tahun 2017 yang menetapkan tujuan tersebut. Laporan UNESCO lebih lanjut menyayangkan bahwa pemuda, terlepas dari keberagaman yang melekat, dianggap sebagai kategori homogen, yang sebagai akibatnya mengabaikan masalah-masalah yang spesifik dihadapi oleh subkelompok tertentu seperti ibu remaja atau pemuda dengan kebutuhan khusus. Oleh karena itu, banyak kebijakan pemuda pada akhirnya tidak menangani masalah yang ada. Alasan lainnya adalah kurangnya pelibatan organisasi kepemudaan dalam penyusunan undang-undang dan pengembangan kebijakan. Beberapa tokoh pemuda yang dimintai pendapatnya melaporkan bahwa suara mereka dalam pertemuan tidak didengar atau diabaikan, yang merupakan warisan budaya paternalisme era orde baru,

yang memandang masyarakat sebagai sebuah keluarga besar di mana anak-anak atau pemuda harus patuh pada orang yang lebih tua, yaitu pegawai negeri sipil senior, dan tidak menuntut kelonggaran atau menyampaikan keluhan. Laporan tersebut lebih jauh mengakui karya serta dampak keberhasilan LSM dan organisasi pemuda, terutama yang memperhitungkan kondisi spesifik lingkungan lokal atau sektoral, tetapi mengkritik bahwa banyak dari LSM dan organisasi pemuda tersebut yang tidak memenuhi syarat untuk menerima pendanaan dari anggaran program pemuda karena tidak memenuhi persyaratan sebagai organisasi pemuda sebagaimana didefinisikan oleh ketentuan proses pendaftaran yang sudah ketinggalan jaman.

Namun, masalah ini mewakili status quo sebelum pandemi Covid-19 melanda negeri itu. Pada saat penulisan makalah ini, pada awal Desember 2020, sudah ada lebih dari 586.000 kasus positif Covid-19 dan 18.000 meninggal - dan angka tersebut terus meningkat. Sementara pemuda kurang rentan terhadap kasus penyakit yang parah, mereka tetap terdampak dengan cara lain akibat pandemi ini.

Dilatarbelakangi oleh langkah-langkah penanggulangan virus Covid-19, perekonomian Indonesia telah jatuh ke dalam resesi yang menyebabkan hilangnya 2,76 Juta pekerjaan. Secara total 9,77 juta orang menganggur pada Agustus 2020, naik 37,61 persen dari Agustus 2019 seperti diberitakan pada awal November (Akhlas 2020a). Pemuda telah dihantam jauh lebih keras daripada kelompok generasi lainnya. Menurut statistik Kementerian Ketenaga-

kerjaan, 67,7% pemuda berusia antara 15 dan 19, 27,7% berusia antara 20 dan 24 tahun dan 11,65% berusia antara 24 dan 29 telah kehilangan pekerjaan (Dewi 2020). Angka-angka ini hanya menunjukkan situasi di sektor formal. Sektor informal, tempat sebagian besar kaum muda miskin perkotaan mendapatkan pekerjaan telah terhantam bahkan lebih parah lagi.

Demikian pula, akan ada efek jangka panjang dalam perkembangan pemuda di tahun-tahun mendatang. Pada Juni 2020, pemerintah menggelontorkan anggaran stimulus COVID-19 sebesar 695,2 triliun Rupiah (sekitar 49,3 miliar Dolar AS) untuk mendukung perekonomian dan mendanai program bantuan sosial dan perawatan medis (Akhlas 2020b). Perombakan anggaran negara untuk membiayai upaya ini membutuhkan biaya dalam anggaran kementerian lain yang akan berdampak jangka panjang pada pelaksanaan program kebijakan, termasuk yang diperuntukkan bagi pemuda.

Di ibu kota dan di beberapa daerah di seluruh Indonesia, sekolah dan universitas telah ditutup selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan yang mana para pelajar dan mahasiswa didesak untuk belajar dari rumah. Kesenjangan struktural akan semakin memperlebar jarak antara mereka yang memiliki hak istimewa dan mereka yang kurang mampu karena akses internet yang tidak merata, sementara kondisi belajar di rumah sangat berbeda, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemuda yang lebih miskin dan di pedesaan untuk mengikutinya.

Menyongsong sebuah titik waktu baru

Pemerintah Jokowi, meski sibuk menangani situasi Covid-19, sejak itu terus melaksanakan agenda ramah investasi dalam beberapa bulan terakhir dengan tabir yang dinamakan RUU Omnibus, reformasi undang-undang yang dirancang untuk menarik investasi asing. Namun, langkah itu dikritik karena memangkas hak-hak pekerja dan upaya-upaya perlindungan terhadap lingkungan.

Pada Oktober 2020, setelah pembatasan sosial parsial kedua di Jakarta berakhir, serangkaian demonstrasi massa digelar untuk memprotes pengesahan RUU Omnibus. Massa yang dimobilisasi tersebut mewakili seluruh spektrum lanskap politik ekstra-parlementer Indonesia. Serikat buruh, anggota gerakan sosial perkotaan dan kelompok lingkungan berbaris bersama kelompok Islam dari semua aliran, menghidupkan kembali gerakan mahasiswa yang diwakili oleh sedikitnya 6000 anggota BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia), lembaga kemahasiswaan yang non-partisan, sekuler, serta netral politik yang secara resmi hadir di semua kampus di Indonesia, yang ikut turun ke jalan bergabung bersama sesama mahasiswa dari sayap kiri serta kubu Islam (Wawancara dengan Ketua BEM SI, Desember 2020, Catatan Penelitian Lapangan).

Tren kebangkitan gerakan mahasiswa yang bersatu menjadi semakin jelas pada November 2019 ketika gelombang pertama demonstrasi massa melanda seluruh negeri,

memprotes sejumlah undang-undang yang sangat kontroversial yang telah diberlakukan: KUHP yang direformasi, yang menjadikan tindakan mengkritik terhadap lembaga negara dan presiden dapat dihukum, dan mengekang kekuasaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah undang-undang Ormas baru yang memberi kekuasaan bagi pemerintah untuk membubarkan organisasi yang dianggap mengancam persatuan nasional dan yang dinamakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memungkinkan penuntutan kritik disiarkan secara online. Undang-undang ini secara resmi dibenarkan untuk membela lembaga-lembaga demokrasi, mengekang ujaran kebencian dan penyebaran berita palsu secara daring dan luring, tetapi sejak diberlakukannya para pengkritik menafsirkan pemberlakuan ini sebagai kebangkitan otoriterisme negara (Amnesty International 2019). Sejumlah aktivis yang menggunakan media sosial untuk memobilisasi demonstrasi dan kritik telah dituntut berdasarkan ketentuan undang-undang baru ini (Warburton 2019, Aspinall 2020). Selain itu, kabinet Jokowi telah menjadi cerminan politik elit yang merajalela ketika Ulama Ma'aruf Amin yang konservatif, yang memainkan peran penting dalam mengobarkan sentimen anti-Ahok, menjadi wakil presiden, dan terlebih lagi ketika Prabowo Subianto dikooptasi dan diberi posisi sebagai menteri setelah pemilu. Ini bukan hanya menjauhkan para pendukung progresif dari Jokowi, tetapi juga menghilangkan pemimpin utama kelompok oposisi konservatif.

Sentimen anti-otoriterisme yang tersebar luas itu mengusung tujuan bersama yang baru

dan memulihkan gagasan tentang aktivisme mahasiswa dan pemuda sebagai *panggilan moral* yang setidaknya telah mengatasi sebagian polarisasi dalam dekade terakhir. Hal ini berpotensi melahirkan gerakan sosial baru yang menuntut keadilan sosial, kebebasan dan integritas. Terlebih lagi, pemuda berpotensi untuk menjadi aktor yang menentukan karena mereka mewakili massa sosial yang sangat besar yang diperbesar lagi dengan dampak ekonomi dari krisis korona.

Ini dapat menjadi jendela kesempatan bagi pemuda dan mahasiswa progresif untuk bersatu sekali lagi untuk mempertahankan pencapaian demokrasi yang telah diperjuangkan oleh generasi sebelumnya. Namun, momentum populisme sayap kanan yang diwarnai Islam mengancam untuk mengkooptasi agitasi mahasiswa dan pemuda yang bangkit ini, ditambah dengan efek destruktif dari kebijakan Covid-19. Memang, tampaknya titik waktu lain dalam sejarah Indonesia sedang disongsong, di mana gerakan pemuda dan mahasiswa dapat memainkan peran yang menentukan dengan mengikuti panggilan moralnya - ke arah mana yang akan diambil?

Daftar Bacaan

- Ali, H. dan Purwandi, L., 2020. *INDONESIA GEN Z AND MILLENNIAL REPORT 2020: The Battle Of Our Generation*. [ebook] Jakarta: Alvara Research Center. Tersedia di: <<http://alvara-strategic.com/indonesia-gen-z-and-millennial-report-2020/>> [Diakses pada 11 November 2020].
- Amnesty.org. 2019. *Everything You Need To Know About Human Rights In Indonesia*. [online] Available at: <<https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/>> [Diakses pada 13 Januari 2021].
- Akhlas, A., 2020a. *Unemployment Surges To Decade High As COVID-19 Causes Millions To Lose Jobs*. [online] www.thejakartapost.com. Tersedia di: <<https://www.thejakartapost.com/news/2020/11/05/unemployment-surges-to-decade-high-as-covid-19-causes-millions-to-lose-jobs.html>> [Diakses pada 9 Desember 2020].
- Akhlas, A., 2020b. Indonesia to spend less than expected of COVID-19 budget by year-end. [online] www.thejakartapost.com. Tersedia di: <<https://www.thejakartapost.com/news/2020/12/01/indonesia-to-spend-less-than-expected-of-covid-19-budget-by-year-end.html>> [Diakses pada 9 Desember 2020].
- Aspinall, E., 2020. *Indonesian Protests Point To Old Patterns - New Mandala*. [online] New Mandala. Tersedia di: <<https://www.newmandala.org/indonesian-protests-point-to-old-patterns/>> [Diakses pada 9 Desember 2020].
- Aspinall, E., 2019. Conclusion: Social Movements, Patronage Democracy, and Populist Backlash in Indonesia. In: T. Dibley and M. Ford, ed., *Activists In Transition - Progressive Politics In Democratic Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, hlm.187-201.
- Aspinall, E., 2012. Indonesia: Moral Force Politics and the Struggle against Authoritarianism. In: M. Weiss, ed., *Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness*, 1st ed. Minneapolis: University of Minnesota Press, hlm.153 - 180.

- Badan Pusat Statistik, 2020. *Statistik Pemuda Indonesia 2019*. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- v. Bruinessen, M. (2013). Introduction: Contemporary Developments in Indonesian Islam and the “Conservative Turn” of the Early Twenty-first Century. In: M. Van Bruinessen (Ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn”* (hlm. 1-20). Singapore ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Dewi, R., 2020. *Situasi Pemuda Indonesia Kini*. [Makalah yang dipresentasikan] Desember 2020. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia.
- Fachriansyah, R., 2020. *Observers Call For Independent Investigation Into Killing Of Six FPI Members In Alleged Clash With Police*. [daring] [www.thejakartapost.com](http://www.thejakartapost.com/news/2020/12/07/observers-call-for-independent-investigation-into-killing-of-six-fpi-members-in-alleged-clash-with-police.html). Tersedia di: <<https://www.thejakartapost.com/news/2020/12/07/observers-call-for-independent-investigation-into-killing-of-six-fpi-members-in-alleged-clash-with-police.html>> [Diakses pada 10 December 2020].
- Grassi, S. dan Nowak, N. (2017). Der Ahok-Fall - Unheilvolle Allianzen als Weckruf für Indonesiens Demokratie. *Internationale Politikanalyse*, [daring] Juli 2017. Tersedia di: <http://library.fes.de/pdf-files/iez/13531.pdf> [Diakses pada 12 Jul. 2017].
- Insani, W., 2019. Commemorate 2019 Indonesian Presidential Elections: Political Clout in Identity, Millennials, and Propaganda. Dalam: F. Pratiwi, M. Salleh, M. Raga, I. Alfiansyah dan N. Putri, ed., *The Role of Identity In Politics and Policy Making*. Surabaya: CV. REVKA PRIMA MEDIA, hlm.121-132.
- Irawanto, B., 2020. Young and Faithless: Wooing Millennials in Indonesia’s 2019 Presidential Election. *ISEAS-Persepective*, 1(2019).
- Laskowska, N., 2019. *The Radicalization Of Students And How To Deal With Them*. [daring] <https://sr.sgpp.ac.id>. Tersedia di: <<https://sr.sgpp.ac.id/post/the-radicalization-of-students-and-how-to-deal-with-them>> [Diakses pada 5 December 2020].
- Nowak, N., 2021. The pursuit of power in the urban kampungs of Kota Tua: An Ethnography of Politics, pluralism and place. [Catatan penelitian lapangan] Feb. 2020 – Jan. 2021. Jakarta/Göttingen: GISCA – Georg-August-Universität Göttingen.
- Ramadhan, A., 2013. *Capacity Building For The Empowerment And Involvement Of Youth In Indonesia*. [Laporan] Tersedia di: <https://www.youthpolicy.org/national/Indonesia_2013_Youth_Policy_Review.pdf> [Diakses pada 1 December 2020].
- Robison, R. dan Hadiz, V. (2004). Reorganising power in Indonesia. London: Routledge Curzon.
- Sastramidjaja, Y., 2019a. Student Movements and Indonesia’s Democratic Transition. In: T. Dibley dan M. Ford, ed., *Activists In Transition - Progressive Politics In Democratic Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, hlm.23-40.
- Sastramidjaja, Y., 2019b. Youth “Alienation”

- and New Radical Politics: Shifting Trajectories in Youth Activism. In: M. Lane, ed., *Continuity and Change after Indonesia's Reforms: Contributions to an Ongoing Assessment*. Singapore: ISEAS Yusoff Ishak House, hlm.238-257.
- Sebastian, L., Chen, J. and Adi Syailendra, E., 2014. *Pemuda Rising*. Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies.
- Setiawan, R., 2015. *Superman Is Dead: Menteri Susi Dukung "Bali Tolak Reklamasinya"*. [daring] suara.com. Tersedia di: <<https://www.suara.com/entertainment/2015/04/13/073600/superman-is-dead-menteri-susi-dukung-bali-tolak-reklamasinya>> [Diakses 8 Desember 2020].
- Tumenggung, A. dan Nugroho, Y., 2005. *Marooned in the junction: Indonesian Youth participation in politics*. In: B. Martin, ed., *Go! Young progressives in Southeast Asia*, 2nd ed. [daring] Manila: Kantor Friedrich-Ebert-Stiftung Filipina, hlm.27-57. Tersedia di: <<http://library.fes.de/pdf-files/bueros/philippinen/04526-toc.html>> [Diakses pada 26 Oktober 2020].
- Warburton, E., 2019. *Indonesia's Pro-Democracy Protests Cut Across Deep Political Cleavages - New Mandala*. [online] New Mandala. Tersedia pada: <<https://www.newmandala.org/indonesias-pro-democracy-protests/>> [Diakses pada 9 Desember 2020].
- Wilson, I., 2019. *Urban Poor Activism and Political Agency in Post-New Order Jakarta*. In: T. Dibley dan M. Ford, ed., *Activists In Transition - Progressive Politics In Democratic Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, hlm.99-116.

Daftar Singkatan

BEM – SI	Badan Eksekutif Mahasiswa – Seluruh Indonesia
BPS	Badan Pusat Statistik
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
FBR	Forum Betawi Rempug
FPI	Front Pembela Islam
Golkar	Partai Golongan Karya
GMNI	Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
HMI	Himpunan Mahasiswa Indonesia
ITE	Electronic Information and Transaction Law
KAMI	Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KAMMI	Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia

KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
NGO	Non-Governmental Organization
NKK	Normalisasi Kehidupan Kampus
PDI-P	Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan
PKI	Partai Komunis Indonesia
PSI	Partai Solidaritas Indonesia
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
UMKM	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah